



# KLIPING DIGITAL

KABUPATEN PADANG PARIAMAN

**KUMPULAN BERITA MEDIA CETAK**



**SUHATRI BUR, SE, MM**  
BUPATI PADANG PARIAMAN

**Drs. RAHMANG, MM**  
WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN





SERAHKAN DATA—Bupati Padangpariaman Suhatri Bur serahkan laporan data SSGI dan SKI kepada BKPK Kementerian Kesehatan RI.

## Pengukuran Balita 100 Persen Pemkab Serahkan Data SSGI-SKI

### PDG. PARIAMAN, METRO

Bupati Padangpariaman Suhatri Bur, kemarin, melakukan audiensi dengan kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) yang bertanggung jawab tentang validasi data kesehatan termasuk Survei Status Kesehatan Indonesia (SS-

GI dan SKI) untuk mengupayakan data Elektronik Pencatatan Dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e ppgbm) Padangpariaman.

"Kita melakukan untuk tindak lanjut dari data yang ada di Padangpariaman. Sehingga BKPK Kementerian Kesehatan RI dapat menindak lanjuti laporan

ini. Makanya, kita Pemkab Padangpariaman memberikan laporan tersebut pada BKPK Kementerian Kesehatan," kata Suhatri Bur didampingi Kepala Dinas Kesehatan Padangpariaman Aspinuddin, kemarin.

Apalagi katanya, data ini yang dipakai untuk menetapkan prevalensi stunt-

ing, karena cakupan pengukuran balita sudah hampir 100 %. Sebab, semua posyandu sudah memakai antropometri standard dan semua petugas pengukur sudah dilatih penggunaan alat antropometri ini.

"Semoga usaha yang kita lakukan ini bisa membawa hasilnya. Sehingga

harap kita tercapai dalam menjalankan program Padangpariaman berjaya. "Dengan demikian kita menyerahkan datanya secara by name by address untuk seluruh balita yang sudah dilakukan pengukuran pada BKPK Kementerian Kesehatan RI," tandasnya. (efa)



## KLIPING BERITA

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

# **POSMETRO PADANG**

Jum'at 19 Januari 2024

## Susun Dokumen RKPD 2025, Seluuh OPD Samakan Persepsi

### PADANGPARIAMAN, METRO

Wakil Bupati Padangpariaman Rahmang membuka rapat orientasi persiapan penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 sebagaimana yang diamanatkan oleh Permendagri nomor 86 tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Padangpariaman melalui Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda)

"Kegiatan rapat ini penting untuk persiapan penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025," kata Wakil Bupati Padangpariaman Rahmang, kemarin.

Wakil Bupati Padangpariaman Rahmang saat itu melibatkan pemangku kepentingan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padangpariaman, meliputi Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian, Direktur RSUD, dan Camat se-Kabupaten Padangpariaman.

Rahmang mengungkapkan, orientasi merupakan langkah awal dalam menyamakan persepsi seluruh perangkat daerah serta pihak yang terlibat dalam penyusunan RKPD tahun 2025.

Dia menyampaikan, penyusunan RKPD tahun 2025 diharapkan mampu melahirkan program dan usulan kegiatan yang strategis dan tepat sasaran sesuai dengan prioritas pembangunan tahun 2025 sehingga dapat mewujudkan Kabupaten Padang Pariaman yang baru, religius, cerdas, dan sejahtera.

Seperti diketahui, selain penyusunan dokumen tahunan RKPD 2025 dan RKPD perubahan 2024, Bapelitbangda juga memiliki PR besar, yakni penyusunan Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Padangpariaman tahun 2025 - 2045. RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan makro berwawasan 20 tahun dan memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang daerah, yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJMD periode 5 tahun.(efa)





## **PADANG EKSPRES**

Jum'at 19 Januari 2024

Padangpariaman, Padek— Pemerintah Kabupaten Padangpariaman melalui Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) menggelar forum konsultasi publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padangpariaman tahun 2025-2045. Acara itu dibuka oleh Asisten II Administrasi Umum, Fakhriati, di Hall IKK kawasan Parit Malintang pada Kamis (18/1).

Fakhriati menjelaskan bahwa RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mencakup visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 tahun. Dokumennya tidak saja menjadi tolak ukur untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Padangpariaman tahun 2025-2029, tetapi juga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

"Melalui forum ini, kita ingin mendapatkan masukan dan saran dari berbagai pihak, termasuk masyarakat. Libatkan seluruh stakeholder untuk memastikan RPJPD menjadi acuan pembangunan daerah yang berkualitas, berkelanjutan, dan selaras dengan rencana pembangunan nasional dan Provinsi Sumatera Barat," ujarnya.

Fakhriati yang didampingi



DISKOMINFO PADANGPARIAMAN

**SEPAKAT:** Penandatanganan oleh tokoh masyarakat yang mengikuti forum konsultasi publik rancangan awal RPJPD Padangpariaman tahun 2025-2045, di Hall Kantor Bupati Padangpariaman, kemarin.

gi oleh Kepala Bapelitbangda Padangpariaman Azwarman berharap, RPJPD yang disusun dapat menjadi dokumen perencanaan pembangunan berkualitas, dan mampu menjawab kebutuhan serta kesejahteraan masyarakat Padangpariaman.

"Kami berharap proses konsultasi publik dan proses lainnya dalam penyusunan RPJPD tahun 2025-2045 bisa berjalan dengan baik dan lancar, sehingga target penetapan RPJPD bersama DPRD Padangpariaman dapat diselesaikan di pertengahan ta-

hun 2024 sebelum berakhirnya periode RPJPD Kabupaten Padangpariaman tahun 2005-2025," tambahnya.

Forum konsultasi publik dihadiri oleh narasumber seperti Tenaga Ahli Regional I Bappenas Clint, Gunawijaya, Dosen Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Padang, Alpon Satrianto, dan Kabid Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Provinsi Sumatera Barat, Yudha Prima.

Acara ini juga ditandai dengan penandatanganan

berita acara kesepakatan Forum Komunikasi Publik Rancangan Awal RPJPD tahun 2025-2045. Turut hadir dalam forum ini unsur DPRD Padangpariaman, Forkopimda Padangpariaman, kepala Perangkat Daerah, Camat se-Padangpariaman, Bappeda Provinsi, Perguruan Tinggi Provinsi Sumbar dan Padangpariaman, Ketua TP PKK Padangpariaman, Ketua Dharmawanita Padangpariaman, serta perusahaan dan lembaga profesi, omas, dan LSM di Padangpariaman. (upg)





## Inspektorat Padang Pariaman Audit Dana BOS Tahun 2023

**PADANG PARIAMAN, HALUAN** — Memasuki tahun 2024, Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman telah memulai audit dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2023 pada Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) se-Padang Pariaman.

Hal tersebut disampaikan Inspektur Hendra Aswara saat melakukan *entry briefing* di SD 02 Kayu Tanam, Selasa (16/1) yang juga dihadiri oleh Kepala SMP 1 dan SMP 2 Kayu Tanam.

Kata Hendra, Inspektorat telah mengirim surat kepada seluruh SD dan SMP dan ditembuskan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Padang Pariaman.

"Inspektorat mulai audit BOS pada minggu ketiga Januari ini. Tim auditor akan langsung mendatangi sekolah" ujar Hendra.

Tim Auditor, tambah Hendra, dibagi menjadi dua tim yang akan berkantor di sekolah-sekolah selama pemeriksaan berlangsung.

"Kita minta kerja sama kepala sekolah untuk menyiapkan dan serahkan dokumen yang minta auditor. Seperti RKAS, SPJ, rekening koran, perjalanan dinas, buku pajak," kata Mantan Kepala DPMPTP itu.

Hendra berharap, tidak ada lagi temuan yang berulang seperti tahun sebelumnya. Contohnya, keterlambatan bayar pajak, administrasi belum lengkap dan aset yang belum tertib.

"Apabila ada temuan kelebihan bayar, diminta setor ke kas daerah dan kesalahan administrasi untuk dilengkapi," kata Hendra.

Diketahui sebelumnya, pada November-Desember 2023 yang lalu, Inspektorat telah melakukan pembinaan pengelolaan BOS kepada 520 SD dan 60 SMP.

Tujuannya untuk pendampingan dan konsultasi pada pengelola BOS untuk lebih akuntabel dan transparan. Sebagai tindak lanjut, maka awal tahun ini Inspektorat melakukan audit BOS untuk menjamin kualitas tata kelola BOS di Padang Pariaman. (h/ahr)



**KEPALA** Inspektorat Padang Pariaman Inspektur Hendra Aswara saat melakukan *entry briefing* di SD 02 Kayu Tanam, Selasa (16/1). IST



## ASN Padangpariaman Tekan Fakta Integritas

**Padangpariaman, Rakyat Sumbar** — Keberadaan tahun politik seperti yang sedang berlangsung dewasa ini memang harus dicermati secara penuh kehati-hatian, terutama bagi jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN), tidak terkecuali bagi jajaran ASN di lingkungan Pemkab Padangpariaman.

Seperti ditegaskan Bupati Padangpariaman Suhatri Bur mengingat saat ini adalah tahun politik, karena itu semua jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Padangpariaman sampai tingkat bawah agar bisa menjaga sikap netralitasnya.

"Karena seperti diketahui bersama pada tahun 2024 mendatang akan berlangsung agenda Pemilihan Umum ( Pemilu ) legislatif serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maupun pemilihan kepala daerah. Makanya sekali lagi perlu kita tegaskan, agar semua jajaran ASN wajib netral dalam kehidupan sehari-harinya maupun saat melaksanakan tugas-tugas negara," kata Bupati Suhatri Bur, menjawab wartawan di Kantor Bupati Padangpariaman.

Katanya lagi, salah satu upaya untuk menjaga netralitas ASN yang ada di lingkungan jajaran Pemkab Padangpariaman pada Pemilihan Umum tahun 2024 yang akan digelar pada 14

Februari mendatang, pihaknya melalui Badan Kepegawatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) sebelumnya telah mengeluarkan Surat Edaran dengan Nomor 800/4141/BKPSDM-PKP/XII/2023.

Surat Edaran (SE) tersebut sekaligus dimaksudkan untuk me wujudkan sikap ASN yang netral dan profesional sekaligus diharapkan terselenggaranya Pemilu Tahun 2024 yang berkualitas dan damai.

"Pemerintah Kabupaten Padangpariaman tentunya sangat mendukung penyelenggaraan Pemilu 2024 yang netral, objektif, dan akuntabel, makanya kita secara intensif terus melakukan pembinaan guna mewujudkan netralitas pegawai ASN dan Non ASN yang ada," ungkapnya.

Melalui Surat Edaran tersebut katanya, turut dilampirkan pula ikrar netralitas pegawai ASN dan non ASN pada Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 serta fakta integritas yang berbunyi menjaga dan menegakkan prinsip netralitas pegawai ASN di lingkungan instansi masing-masing. Demikian pula diharapkan bisa menghindari konflik, bijak dalam menggunakan media sosial sekaligus bijak dan tegas dalam menolak politik uang. (ris)



**BUPATI** Suhatri Bur, saat penandatanganan fakta integritas terkait netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 mendatang.